

AUDIT DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Yovenalis A'ai. Elfreda Aplonia Lau. Imam Nazarudin Latif

Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : yoves.224@gmail.com

ABSTRACT

The financial statements are drawn up Upon Kutai Barat Regency is a structured report regarding the financial position and the transactions carried out by an entity reporting. Financial reporting is useful to present useful information for decision making and to show accountability and reporting entities.

The formulation of the issue as to whether the financial statements are presented already meets Government accounting standards (SAP). Whether the financial statements are presented by a local government in Kutai Barat in Recommend Reasonable Without Exception (WTP).

The theoretical foundations of financial accounting focus on financial statements presented meets Government accounting standards (SAP). Financial report on local government by the Kutai Barat serve in Recommend Reasonable Without Exception (WTP).

As for the Hypothesis presented the financial report presented do not meet Government accounting standards (SAP). Financial reporting by local government serve in Kutai Barat in Recommend Reasonable with the exception of (WDP). that measurement, presentation and reporting in the Government of Kutai Barat Regency, has presented reasonably.

The research results showed that the financial statements adequately disclosed, there was no disobedience influential direct and material. Measurement, presentation and reporting as well as control served yet reasonable and do not meet Government accounting standards (SAP). Thus this research hypothesis is accepted.

Keywords: Audit and transparency of financial statements.

PENDAHULUAN

Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah: 1. Sistem Akuntansi dan IT *Based System* Melihat kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT *based system* yang lebih rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 2004 yang menyatakan "Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian

Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut pada tahun 2008 telah terbit PP No 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Komitmen dari pimpinan Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. 3. Tersedianya SDM yang kompeten Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR dan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi menjelang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Disamping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. Resistensi terhadap perubahan Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis

ingin meneliti mengenai sistem yang diterapkan di Kutai Barat apakah sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah, maka penulis tertarik memilih judul “Audit dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Barat”.

DASAR TEORI

Pengertian Audit

Audit adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang diperlukan untuk memeriksa laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang telah diaudit lebih dipercaya pengguna-pengguna laporan keuangan.

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1). Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 2). Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 3). Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4). Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5). Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- 6). Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7). Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua1 Nomor 1, 2010 :6).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

- (a). Relevan;
- (b). Andal;
- (c). Dapat dibandingkan; dan
- (d). Dapat dipahami.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

- (a). Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- (b). Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- (c). Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- (d). Lengkap.

Charles T. Horngren, dan Walter

T.Harrison (Horngren

Harrison,2007:4) menyatakan bahwa: Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Kesimpulannya bahwa akuntansi itu adalah sesuatu yang mengukur bisnis, dari mulai penggolongan transaksi dan pengumpulan data lainnya menjadi laporan keuangan, dan setelah selesai menjadi laporan keuangan akan diambil suatu keputusan dari laporan tersebut.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:106) menyatakan :

”Jenis laporan keuangan terdiri dari jenis laporan keuangan utama dan pendukung, seperti; Daftar Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Harga Pokok Produksi, Laporan Laba Ditahan, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Kegiatan Keuangan.”

Menurut Kieso et al (2011:7) Mengungkapkan pengertian dari laporan keuangan (*Financial Statements*) :

“Financial Statements are the principal means through which a company communicates its financial informations to those outside it. These statements provide a company’s history quantified in money term”.

Menurut Sukrisno Agoes, (2004:8), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas : “ Pemeriksaan Umum (*General Audit*), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.” “ Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditee yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.”

Variabel penelitian dan indikator variabel penelitian dijelaskan sebagai berikut :

Audit dan Transparansi Pengelolaan Keuangan

Audit merupakan satu set prosedur yang sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan yang memberikan informasi sehingga akuntan dapat menyatakan suatu pendapat tentang laporan keuangan yang diperiksa disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Pengertian Audit menurut Mulyadi (2002:9) adalah sebagai berikut :

“ Proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. ”

Pengertian Audit menurut (Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder, 2011:4)

“ Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”. (Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten, independen orang).

Pengertian audit menurut PSAK - Tim Sukses UKT Akuntansi 2006, “Suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian dan melihat bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan dan menkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan”.

Dari pengertian Audit tersebut diambil kesimpulan bahwa memeriksa (audit)

dilakukan oleh pihak yang independen, berpengalaman dan memiliki kecakapan serta pemahaman yang cukup mendalam mengenai pemeriksaan akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Transparansi

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi *public*.

Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) adalah sebagai berikut :

“ Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. “

Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ;

- a. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan , yakni

informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Agus Dwiyanto mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “*simple, straightforward and easy to apply*” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely dan readily available*).

Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Terjaminnya Akuntabilitas berorientasi pada hasil dan hal ini merupakan landasan penerapan anggaran berbasis kinerja. Artinya, dalam pertanggungjawaban Keuangan Negara, akan dilihat kinerja apa yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam menghabiskan dana APBN/APBD. Jika tidak ada kinerja yang dicapai maka tidak boleh se-sen-pun uang Negara dibelanjakan.

METODE PENELITIAN

Alat Analisis Data

Berdasarkan permasalahan, tujuan dan hipotesis yang diajukan maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jika pada PP Nomor 24 Tahun 2005 diatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual maka pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terbagi atas 2 (dua) lampiran yaitu (SAP) berbasis Akrual dan berbasis Kas Menuju Akrual. Di bawah ini disajikan Pokok-Pokok Perbedaan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP Berbasis Akrual.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat memberikan gambaran aktivitas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selama satu tahun, penulis menyajikan data dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai

Barat Tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel: LRA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT				
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH				
Untuk Tahun Yang Berakhir s.d 31 Desember 2013 dan 2012				
NO	URAIAN	Anggaran 2013	Realisasi 2013	% Realisasi 2012
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.929.287.251,82	90.235.901.157,81	125,45
3	Pendapatan Pajak Daerah	18.181.345.152,82	16.305.652.642,45	89,68
4	Pendapatan Retribusi Daerah	11.717.136.395,48	15.875.770.496,43	135,49
5	Pendapatan Hasil Pengekahaan kekayaan Asli Daerah	4.920.401.127,25	5.618.348.306,66	114,18
6	Lain-Lain PAD yang Sah	37.110.404.486,53	52.436.129.712,27	141,30
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)	71.929.287.251,82	90.235.901.157,81	125,45
8				
9	PENDAPATAN TRANSFER			
10	TRANSFER PEERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.863.028.906.071,00	1.768.419.499.473,00	94,92
11	Dana Bagi Hasil Pajak	85.968.736.466,00	77.761.138.812,00	90,45
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.073.228.189.605,00	986.826.380.661,00	91,95
13	Dana Alokasi Umum	599.731.000.000,00	599.731.000.000,00	100,00
14	Dana Alokasi Khusus	104.100.920.000,00	104.100.920.000,00	100,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d 14)	1.863.028.906.071,00	1.768.419.499.473,00	94,92
16				
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	31.231.634.000,00	35.243.194.500,00	112,84
18	Dana Otonomi Khusus	31.231.634.000,00	35.243.194.500,00	112,84
19	Dana Penyesuaian	-	-	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (18 s.d 19)	31.231.634.000,00	35.243.194.500,00	112,84
21				
22	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI	370.281.540.800,00	362.297.840.750,00	97,82
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.949.980.800,00	151.866.280.750,00	253,33
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	210.431.600.000,00	210.431.600.000,00	100,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s.d 24)	370.281.540.800,00	362.297.840.750,00	97,82
26	Total Pendapatan Transfer (15-20+25)	2.264.642.080.871,00	2.165.960.534.723,00	95,64
27				
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
29	Pendapatan Hibah			
30	Pendapatan Dana Darurat			
31	Pendapatan Lainnya			
32	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (29 s.d 31)			
33	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)	2.336.571.368.033,08	2.256.196.435.880,81	96,56
34				
35	BELANJA			
36	BELANJA OPERASI	1.350.691.237.526,12	1.178.103.792.084,09	87,22
37	Belanja Pegawai	663.104.654.677,60	608.621.250.665,85	91,78
38	Belanja Barang	442.459.221.278,21	391.593.795.711,27	88,50
39	Bunga			
40	Subsidi	26.418.298.770,65	24.724.494.979,97	93,59
41	Hibah	144.347.542.804,66	90.621.771.410,00	62,78
42	Bantuan Sosial	74.361.519.995,00	62.542.479.317,00	84,11
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s.d 42)	1.350.691.237.526,12	1.178.103.792.084,09	87,22
44				
45	BELANJA MODAL	1.281.566.066.132,58	1.188.529.253.867,05	92,74
46	Belanja Tanah	70.898.865.500,00	33.459.322.757,00	47,19
47	Belanja Peralatan dan Mesin	92.544.689.533,00	83.700.510.685,85	90,44
48	Belanja Gedung dan Bangunan	271.407.210.197,60	254.407.372,00	93,74
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	820.411.475.101,08	792.335.850.842,20	96,58
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	26.304.023.800,00	24.628.475.210,00	93,62
51	Belanja Aset Lainnya			
52	Jumlah Belanja Modal (46 s.d 51)	1.281.566.066.132,58	1.188.529.253.867,05	92,74
53				
54	BELANJA TAK TERDUGA	3.301.427.007,00	2.801.427.007,00	84,86
55	Belanja Tak Terduga	3.301.427.007,00	2.801.427.007,00	84,86
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s.d 55)	3.301.427.007,00	2.801.427.007,00	84,86
57	JUMLAH BELANJA (43+52+56)	2.635.558.730.665,70	2.369.434.472.958,14	89,90
58				
59	TRANSFER			
60	TRANSFER/BAGI HASIL KEDESA			
61	Bagi Hasil Pajak			
62	Bagi Hasil Retribusi			
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KEDESA (61 s.d 63)			
65				
66	SURPLUS/DEFISIT (33-64)	2.336.571.368.033,08	2.256.196.435.880,81	96,56
67				
68	PEMBIAYAAN			
69	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	365.650.463.760,13	368.941.588.760,13	1,01
70	Penggunaan SILPA	365.650.463.760,13	365.650.463.760,13	1,00
71	Penerimaan Dana Cadangan			
72	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
73	Piutang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			
74	Piutang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	10.000.000.000,00	3.291.125.000,00	31,05
75	Piutang Dalam Negeri - Pemerintah Lembaga Keuangan Bank			
76	Piutang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			
77	Piutang Dalam Negeri - Obligasi			
78	Piutang Dalam Negeri - Lainnya			
79	Penerimaan Kembali Piutang Kepada Perusahaan Negara			
80	Penerimaan Kembali Piutang Kepada Perusahaan Daerah			
81	Penerimaan Kembali Piutang Kepada Perusahaan Daerah Lainnya			
82	Jumlah Penerimaan (71 s.d 82)	365.650.463.760,13	368.941.588.760,13	1,01
83				
84	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
85	Pembentukan Dana Cadangan			
86	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	26.820.401.217,25	25.820.000.000,00	96,27
87				

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan :

Tabel: Neraca			
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT			
N E R A C A			
Per 31 Desember 2013 dan 2012			
Uraian	Tahun 2013	Tahun 2012	
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 810.738.237,00	Rp 1.213.419.081,00	
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp -	
Piutang Retribusi	Rp -	Rp -	
Piutang Lainnya	Rp 321.758.170,00	Rp 212.999.000,00	
Persediaan	Rp 1.963.295.000,00	Rp 296.558.250,00	
Jumlah Aset Lancar	Rp 3.095.791.407,00	Rp 1.722.976.331,00	
ASET TETAP			
Tanah	Rp 208.162.726.729,00	Rp 179.124.976.923,00	
Peralatan dan Mesin	Rp 215.846.193.923,00	Rp 165.967.143.992,00	
Gedung dan Bangunan	Rp 110.703.496.010,00	Rp 102.142.612.000,00	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 4.674.133.500,00	Rp 2.342.077.500,00	
Aset Tetap Lainnya	Rp 6.831.001.500,00	Rp 6.115.576.500,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan			
Jumlah Aset Tetap	Rp 546.217.551.662,00	Rp 455.692.386.915,00	
ASET LAINNYA			
Tagihan Penjualan Ansuran	Rp -	Rp -	
Tuntutan Perbendaharaan	Rp -	Rp -	
Tuntutan Ganti Rugi	Rp -	Rp -	
Aset Lain-Lain	Rp 571.000.000,00	Rp 284.000.000,00	
Jumlah Aset Lainnya	Rp 571.000.000,00	Rp 284.000.000,00	
TOTAL ASET	Rp 549.884.343.069,00	Rp 457.699.363.246,00	
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	
Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 1.300.000.000,00	Rp 1.044.652.000,00	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 1.300.000.000,00	Rp 1.044.652.000,00	
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 810.738.237,00	Rp 1.213.419.081,00	
Pendapatan yang Dianggarkan	Rp -	Rp -	
Cadangan Piutang	Rp -	Rp -	
Cadangan Persediaan	Rp 321.758.170,00	Rp 212.999.000,00	
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	Rp 1.963.295.000,00	Rp 296.558.250,00	
Dana Yang Harus Disediakan untuk Utang	Rp -1.300.000.000,00	Rp -1.044.652.000,00	
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	Rp 1.795.791.407,00	Rp 678.324.331,00	
EKUITAS DANA INVESTASI			
Dimvestasikan dalam Aset Tetap	Rp 546.217.551.662,00	Rp 455.692.386.915,00	
Dimvestasikan dalam Aset Lainnya	Rp 571.000.000,00	Rp 284.000.000,00	
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	Rp 546.788.551.662,00	Rp 455.976.386.915,00	
JUMLAH EKUITAS DANA	Rp 548.584.343.069,00	Rp 456.654.711.246,00	
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	Rp 549.884.343.069,00	Rp 457.699.363.246,00	

Sumber Data : Sekretariat Kab. Kutai Barat

Perbedaan mendasar SAP Berbasis Kas menuju Akruar dengan SAP Berbasis Akruar terletak pada PSAP 12 mengenai laporan operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/Defisit Operasional merupakan penambahan atau pengurangan ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan

bersangkutan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa laporan keuangan sudah memenuhi Standar akuntansi Pemerintah (SAP), yang membedakan laporan keuangan tersebut adalah terletak pada SAP Berbasis Akrua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyajian dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat disajikan sudah memenuhi Standar akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Diungkapkan secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

Dari uraian diatas maka disimpulkan bahwa hipotesis yang dikemukakan tidak terbukti, maka hipotesis ditolak.

Saran

Agar dapat menjawab permasalahan dimasa yang akan datang dan sebagai masukan, perbaikan dan penyempurnaan, pengukuran, penyajian dan pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, maka saran yang ingin penulis sampaikan yaitu :

1. Melaksanakan pengukuran, penyajian dan pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
2. Tetap konsistensi dalam pengendalian pelaporan keuangan sehingga penyajian laporan keuangan tetap dapat disajikan secara wajar dan Akuntebel.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. (2013). Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Angkuntan oleh Angkuntan Publik.Edisi 4 – Buku 2

_____, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2008. <http://www.bpk.go.id> diakses pada 15 Juli 2011.

_____, Implementasi PP Nomor 6 Tahun 2008.

_____, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrua sebagai pengganti PP 24 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2